

ANALISIS TINGKAT PENGEMBALIAN MENGALAMI MASALAH KEGIATAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG

Dety Lafera

Akademi Akuntansi Indonesia (AAI) Padang

Email : detylafera20@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung Tahun 2008-2016. Formula yang dilakukan untuk menganalisis tingkat pengembalian adalah NPL (*non performing loan*). NPL adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi kredit dan atau pinjaman bermasalah keuangan suatu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung pada periode 2008-2016 yang jumlahnya selama 9 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif*. Ditunjukkan dari nilai NPL dari hasil analisis deskriptif Kecamatan 2x11 Enam selalu mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2016. Dimana besarnya nilai NPL terendah dicapai pada tahun 2014 sebesar 2,65%.

Kata Kunci : Unit Pelaksana Kegiatan, Tingkat Pengembalian Pinjaman Bermasalah (NPL)

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menghadapkan perubahan perilaku masyarakat pada umumnya, baik di desa maupun kota. Pada sebagian pelaku ekonomi terutama ekonomi lemah, banyak yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan keterbatasan pemilikan modal dan pada umumnya mereka termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran dan peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Berdasarkan sumber data statistik 2017, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 380.63 sebesar 67.19% berada pada daerah pedesaan. Sementara pada tahun 2014 jumlah masyarakat miskin sebanyak 733.94 sebesar 70.48% berada pada pedesaan. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlah masyarakat miskin di Propinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 0.65% namun dari total jumlah masyarakat miskin tetap banyak terdapat pada daerah pedesaan yaitu sebesar 67,65%. Sementara tahun 2016 jumlah masyarakat miskin tetap banyak terdapat pada daerah pedesaan yaitu sebesar 68,12%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin pada Propinsi Sumatera Barat banyak terdapat pada daerah pedesaan dibandingka daerah perkotaan. Berdasarkan hal inilah maka pemerintah berupaya menangani masalah kemiskinan pada tersebut.

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program - program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk

menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.

PNPM Mandiri Perdesaan didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Terdapat beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu pembangunan sarana untuk masyarakat, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) untuk membuka atau mengembangkan usaha, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan dilaksanakannya pengembangan keterampilan masyarakat, pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dan dalam program Pembangunan ini juga mengikut sertakan perempuan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) yaitu pemberian modal untuk pengembangan usaha. Dengan kondisi semacam ini maka pemerintah melaksanakan program pembangunan diberbagai wilayah, dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Sasaran pembangunan terutama kepada mereka yang dikategorikan miskin.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-samaberdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar dana BLM SPP ini yang tidak dikembalikan dalam kelompok simpan pinjam pada Kecamatan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. Adapun besarnya jumlah dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diterima dan yang dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan 2x11 Enam Lingsung dapat dilihat dari total dana PNPM MPd yang diterima sampai tahun 2012 sebesar Rp. 9.400.000.000,- telah dialokasikan untuk SPP sebesar Rp.1.661.500.000,- pada Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, dalam arti kata dari total dana PNPM MPd yang diterima Kecamatan 2x11 Enam Lingsung dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 17,68% dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Dari hasil *survey* sementara yang penulis lakukan total dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan 2x11 Enam Lingsung sampai tahun 2015 telah mencapai Rp. 2.351.763.900,-.

Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan merupakan program yang paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga, karena selain suku bunga lebih rendah dari pada bank pada umumnya proses peminjamannya juga tanpa adanya angunan atau jaminan sehingga memudahkan akses pendanaan atau permodalan bagi usaha skala mikro yang akan mereka lakukan, karena pada umumnya kebanyakan dari masyarakat ibu rumah tangga tersebut kesusahan dalam melakukan pinjaman dikarenakan adanya jaminan atau angunan sehingga banyak dari ibu rumah tangga yang tidak memiliki jaminan tidak dapat meminjam uang di bank atau koperasi yang sudah ada.

Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25 persen dari dana BLM. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Adapun dalam pengusulan pinjaman merupakan kelompok koperasi masyarakat yang dalam setiap kelompok pengusul memiliki anggota minimal 10 orang anggota. Alokasi dana yang berasal dari Bantuan Langsung masyarakat (BLM) untuk program

SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif.

Selain itu programsimpan pinjam kelompok perempuan diprioritaskan untuk para pelaku usaha mikro kecil khususnya untuk ibu rumah tangga. Modal bantuan yang diberikan adalah pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan yang dialokasikan ke beberapa kelompok pada setiap satu desa. Dengan demikian, program simpan pinjam kelompok perempuan diharapkan dapat menjadi alternatif dari kendala modal yang dihadapi dalam pengembangan usaha.

Pada beberapa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, khususnya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pun terjadi beberapa masalah yang timbul, antara lain: ketidaktepatan sasaran kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), sebagian masyarakat tidak menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha, bahkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dalam pengelolaan dana pada Program Simpan Pinjam Perempuan, berdasarkan dari keterangan salah satu pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung mengatakan bahwa permasalahan yang kerap terjadi yaitu adanya tunggakan setoran yang hampir dialami sebagian besar kelompok ibu rumah tangga yang meminjam uang di PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, bahkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini suatu keadaan dimana masyarakat sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Unit Pelaksana Kegiatan sesuai dengan perjanjian dimana ini membuat pelaksanaan program Simpan Pinjam Untuk Perempuan tidak dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan kelembagaan kelompok yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan kelompok peminjam sebagaimana mestinya, permasalahan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha/kegiatan itikad pada tingkat kelompok/pemanfaat sehingga mengakibatkan pengembalian ke UPK, permasalahan adanya penyelewengan dana dan permasalahan Force Majeure: permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, huru-hara, perang dan kematian pemanfaat atau musibah karena kurang antisipasi resiko usaha.

METODE PENELITIAN

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data sampel Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang berjumlah tiga nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data jumlah pinjaman dan jumlah pengembalian pinjaman pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2008-2016. Selanjutnya data yang telah didapatkan tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel input dan output.

- a) Variabel input berupa Alokasi anggaran untuk tiap-tiap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Target Anggaran yang dicapai oleh tiap-tiap kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2008-2016.
- b) Variabel output berupa Realisasi anggaran dari dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2008-2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya nilai NPL berdasarkan lampiran 1 pada Kecamatan Batang Anai tahun 2008 - 2016 yang dihitung dalam analisis ini secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1: Hasil analisis Non Performing Loan (NPL) Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Tahun 2008-2016 (dlm %)

| No | Tahun | Jumlah Kolektibilitas | Jumlah Pinjaman | NPL |
|----|-------|-----------------------|-----------------|------|
| 1 | 2008 | | 1.275.637.000 | |
| 2 | 2009 | 218.275.200 | 4.100.070.700 | 5,32 |
| 3 | 2010 | 623.738.700 | 8.423.901.200 | 7,40 |
| 4 | 2011 | 863.373.000 | 13.389.728.500 | 6,45 |
| 5 | 2012 | 722.087.400 | 17.793.180.000 | 4,06 |
| 6 | 2013 | 659.771.400 | 19.062.231.200 | 3,46 |
| 7 | 2014 | 589.875.400 | 22.235.143.000 | 2,65 |
| 8 | 2015 | 702.406.136 | 24.503.365.300 | 2,87 |
| 9 | 2016 | 817.714.200 | 27.578.844.300 | 2,96 |

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai NPL pada Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung mengalami kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 39.097 % dimana besarnya nilai NPL pada tahun 2010 sebesar 7.40%. Walaupun nilai NPL ini berada diatas nilai yang ditetapkan oleh Bank Central terhadap lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank terhadap kredit / pinjaman bermasalah sebesar 5 %. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk melihat tingkat pengembalian pinjaman bermasalah dengan menggunakan formula NPL pada Kecamatan 2X 11 Enam Lingkung tahun 2008-2016, maka besarnya nilai NPL pada Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung ini tidak terlalu buruk . Ini disebabkan karena pelaksanaan PNPM MPd yang alokasi dana untuk kegiatan SPP pada Kec. 2X 11 Enam Lingkung diawali pada tahun 2008 bulan Oktober. Dan pada masa ini masih kurangnya pengawasan terhadap kegiatan SPP ini. Ini dikarenakan karena pada masa itu pelaksanaan program SPP masih merupakan bagian dari bentuk kegiatan BLM (bantuan langsung masyarakat) dalam bentuk kredit mikro (mikro finance). Dari dapat dilihat bahwa nilai NPL pada Kecamatan 2 X 11 enam lingkung selalu mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2016. Dimana besarnya nilai NPL terendah dicapai pada tahun 2,65%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dalam program pemerintah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berada pada kondisi Baik ditinjau dari segi ketetapan Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank sebesar 5% batas maksimum nilai NPL. Meskipun tahun 2014 sampai 2016 besarnya nilai NPL mengalami kenaikan, namun demikian kenaikan ini tidak terlalu signifikan, masih jauh dibawah batas maksimum ketetapan NPL dalam artian kata kinerja keuangan UPK 2 X 11 Enam Lingkung berada pada kondisi sehat / Baik.

Deskripsi statistik Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Tahun 2008–2016 yang dipergunakan dalam analisis ini secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2 : Analisis Deskriptif NPL Kec.2X11 Enam Lingkung Tahun 2008 - 2016 (dlm %)

| Descriptive Statistics | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|------|-------|--------|------------|----------------|-----------|
| | N | Range | Min | Max | Sum | Mean | | Std. Deviation | Variance |
| | Sta | Sta | Sta | Sta | Sta | Sta | Std. Error | Sta | Statistic |
| NPL | 8 | 4.75 | 2.65 | 7.40 | 35.17 | 4.3962 | .63422 | 1.79384 | 3.218 |

Tabel 2 : Analisis Deskriptif NPL Kec.2X11 Enam Lingkung
Tahun 2008 - 2016 (dlm %)

Descriptive Statistics

| | N | Range | Min | Max | Sum | Mean | | Std. Deviation | Variance |
|--------------------|-----|-------|------|------|-------|--------|------------|----------------|-----------|
| | Sta | Sta | Sta | Sta | Sta | Sta | Std. Error | Sta | Statistic |
| NPL | 8 | 4.75 | 2.65 | 7.40 | 35.17 | 4.3962 | .63422 | 1.79384 | 3.218 |
| Valid N (listwise) | 8 | | | | | | | | |

Sumber: Ringkasan Analisis Deskriptif NPL Kec.2X11 Enam Lingkung

Dari tabel analisis deskriptif pada Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Rata-rata Non Performing Loan (NPL) selama 9 tahun sebesar 4.39%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPL selama tahun tersebut berada dibawah batas maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Pada Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung yang mempunyai nilai NPL terendah yaitu pada tahun 2014, (lihat lampiran 1) dengan nilai sebesar 2,65%. Sedangkan nilai NPL tertinggi yaitu pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 7,40%. Rata-rata Non Performing Loan (NPL) selama 9 tahun sebesar 4.3962%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPL selama delapan tahun tersebut berada dibawah batas maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti mengenai Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Progran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Tahun 2008-2016 dengan menggunakan formula *non performing loan (NPL)*. Pelaksanaan PNPM MPd yang alokasi dana untuk kegiatan SPP pada kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung diawali pada tahun 2008 bulan Oktober. Besarnya nilai NPL pada Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung ini tidak terlalu buruk.

Nilai NPL pada Kecamatan 2 X 11 enam lingkung selalu mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2016. Dimana besarnya nilai NPL terendah dicapai pada tahun 2,65%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dalam program pemerintah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berada pada kondisi Baik ditinjau dari segi ketetapan Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank sebesar 5% batas maksimum nilai NPL. Meskipun tahun 2014 sampai 2016 besarnya nilai NPL mengalami kenaikan, namun demikian kenaikan ini tidak terlalu signifikan, masih jauh dibawah batas maksimum ketetapan NPL dalam artian kata kinerja keuangan UPK 2 X 11 Enam Lingkung berada pada kondisi sehat / Baik.

Saran

Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka penelitian mendatang perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Diharapkan penelitian mendatang dapat menjangkau aspek manajemen UPK dalam melakukan penilaian kredit / pinjaman dan penilaian dari unsur kelompok masyarakat.
2. Masih terdapatnya nilai NPL, disini diharapkan UPK Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung lebih memperhatikan proses awal dalam pencairan Dana Bergulir (SPP) dengan melakukan seleksi secara kolektif terhadap calon kelompok peminjam dalam arti kata

calon kelompok peminjam ditentukan sesuai dengan PTO supaya dana lebih tepat sasaran kepada kelompok dan pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok betul-betul menggunakan dana tersebut untuk modal usaha.

3. Agar unit Pelaksana Kegiatan (UPK) lebih meningkatkan pemantauan (survey) kelengkapan, dan lebih ditingkatkan mengadakan pelatihan terhadap anggota kelompok mengenai pengembangan usaha dan sistem kewirausahaan, serta menekankan kepada anggota kelompok atas sanksi yang diberikan kepada anggota kelompok yang mengalami kemacetan atas pengembalian pinjaman baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan sanksi pinjaman bermasalah dengan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Yogyakarta
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2008), *Penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Gita Mulyasari, *Kajian Partisipasi Perempuan Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Di Kota Bengkulu*.
- Handoko T. Hani (2000), *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas, Yogyakarta: BPFE 8
- Juliarni Sipayung (2012), *Efektifitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*
- Jusmawati, 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kuncoro Mudrajad (2010), *“Manajemen Perbankan, Teori Dan Aplikasi”*, Yogyakarta, BPFE
- Min Anwar Rasyid (2014) *Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Tentang Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Untuk Perempuan SPP)*
- Mahmudi (2011), *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta
- Musrizal dan Hakim Muttaqim (2011), *Efficiency Refund Loan Program Savings And Loans Of Women In Poverty Reduction In District By Using Data Envelopment Analysis (DEA)*.
- Mahmudi (2005), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- M. Suparmoko (2002), *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPEE, Yogyakarta
- Pandia Frianto (2012), *“Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank”*, Rineka Cipta, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)* (Revisi 1998) tahun 2007
- Subramanyam K.R (2010), *“Analisis Laporan Keuangan”*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*
- UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang *Perkoperasian*
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.
- Wiyono, Gendro (2011), *“Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS & SMART PLS”*, Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.

Yanuar, Frediyanto, 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.